

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Studi Kepustakaan

##### 2.1.1 Deskripsi Konseptual Ilmu Administrasi

Secara etimologis administrasi berasal dari bahas latin “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti membantu, melayani atau memenuhi. Kemudian “*administration*” berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, pemerintahan, dan pengelolaan. Administrasi dapat dipahami baik secara sempit maupun secara luas, administrasi secara sempit yaitu “*administratie*” (belanda) yang berarti “Tata usaha” atau “Penataan”. Administrasi secara luas yaitu “*administration*” (Inggris) “rangkaiannya dalam pencapaian tujuan”.

Menurut Siagian (2011;2) Administrasi sebagai keseluruhan proses aktivitas kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Gie (2010:20) mengemukakan pengertian administrasi sebagai segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap suatu pekerjaan pokok yang dilakukan sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi merupakan rangkaian kegiatan (proses) yang wujudnya: merencanakan, memutuskan, menyusun, mengatur, memimpin, mengurus, mengarahkan, membimbing, menselaraskan, mengendalikan, mengawasi, menyempurnakan, dan kegiatan-kegiatan semacam itu. Untuk ringkasnya

kegiatan-kegiatan semacam itu tercakup dalam suatu istilah yaitu disebut “menata” atau “penataan”. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pengertian administrasi adalah rangkaian kegiatan penataan (Gie, 2010:75).

Gie (2010;78) menetapkan 8 unsur pelaksanaan penataan sebagai suatu kegiatan administrasi :

1. Organisasi

Organisasi merupakan wadah dimana kegiatan organisasi dilaksanakan. Dalam organisasi dikelompokkan orang-orang, tugas-tugas, wewenang dan tanggungjawab, serta hubungan diantara para pekerja.

2. Manajemen

Manajemen merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan orang-orang dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama betul-betul tercapai

3. Komunikasi

Komunikasi merupakan rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama yang bersangkutan.

4. Kepegawaian

Kepegawaian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mengurus tenaga kerja yang diperlukan

5. Keuangan

Keuangan merupakan rangkaian kegiatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama

6. Perbekalan

Perbekalan merupakan rangkaian kegiatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai kepada penyingkiran benda-benda perlengkapan dalam usaha kerjasama

7. Tata Usaha

Tata Usaha merupakan rangkaian kegiatan menghimpun, mencatat mengolah, menggunakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan

8. Hubungan masyarakat

Hubungan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan dalam menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekeliling terhadap usaha kerjasama yang bersangkutan.

Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama dan upaya (organisasi dan manajemen) yang bersifat sistematis, rasional, dan manusiawi yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, termasuk dalam pemberian pelayanan (Nawawi, 2013;77).

Ada tiga unsur dalam administrasi, diantaranya administrasi melibatkan dua orang atau lebih, administrasi dilakukan secara bersama-sama, serta ada tujuan tertentu yang hendak dicapai (Muhfiz, 2009;1). Hal ini sesuai dengan pendapat Gie bahwa administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya agar terjalin aktivitas kerjasama harus ada orang-orang yang

terlibat didalamnya, yang kemudian bekerja bersama mencapai tujuan bersama pula.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli yang dikemukakan, administrasi merupakan proses kerjasama antara satu orang dengan lainnya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Administrasi mempunyai arti secara sempit serta secara luas, dalam artian administrasi bisa dilihat sebagai proses penatausahaan bisa juga diartikan sebagai kerjasama antara manusia, tergantung bagaimana administrasi tersebut ditempatkan.

### **2.1.2 Deskripsi Konseptual Manajemen**

Administrasi tidak pernah terlepas dengan istilah manajemen. Apabila organisasi terbentuk, maka organisasi tersebut memerlukan suatu manajemen.

Manajemen secara umum merupakan proses pencapaian tujuan melalui dinamika kerja sama manusia atau melalui kegiatan orang lain.

Menurut Terry (2010; 49) Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan lainnya.

Sedangkan Henne & Desmidt (2010;8) menyebutkan bahwa manajemen merupakan seerangkaian aktivitas manusia yang berkesinambungan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkannya. Aktifitas tersebut diurai kedalam urutan fungsi-fungsi yang spesifik, yakni: (1) Perencanaan; (2) Pengorganisasian; (3) Kepemimpinan; dan (4) Pengendalian.

Manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor dan sumberdaya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu (Prajudi, 2010;49).

Menurut Stoner Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fahmi 2012;2)

Menurut Zainun (2001;17) bahwa salah satu sumber daya yang penting bagi manajemen adalah manusia yang berkedudukan sebagai manajer dan pegawai/karyawan/buruh atau pekerja.

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan tata cara dalam mengatur, mengelola, serta memanfaatkan unsur-unsur sumberdaya yang ada dalam organisasi/kelompok.

### **2.1.3 Deskripsi Konseptual Organisasi**

Menurut Barnard Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi Kemudian menurut Gulick Organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang

menjangkau dari puncak sampai kedar diseluruh badan usaha (Syafiie, 2012;11-12)

Organisasi dapat dimaknai sebagai sistem bagi para pelakunya yang saling ketergantungan serta memiliki tujuan-tujuan bersama yang terkait pada penciptaan dan pendistribusian nilai-nilai yang berlaku dilingkungan tersebut dan melalui interaksi kedua-duanya (Henne & Desmidt 2010;3).

Gagasan mengenai organisasi dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang yang berbeda Pertama, keberadaan organisasi lebih ditekankan sebagai entitas yang mengandung bobot kelembagaan. Organisasi dianggap sepenuhnya sebagai suatu sistem kelembagaan yang konkrit dan berdiri sendiri. Dalam perspektif ini entitas sosial adalah juga termasuk organisasi. Kedua, keberadaan organisasi lebih sebagai lembaga yang mengandung berbagai perangkat organisasi. Dalam perspektif ini, perangkat organisasi dapat berbentuk struktur, prosedur, dan batasan-batasan mengenai tugas, wewenang maupun tanggungjawabnya. Dikaitkan dengan pengertian ini maka suatu entitas sosial patut pula memiliki perangkat organisasi seperti itu. Ketiga, keberadaan organisasi lebih ditekankan pada proses pengorganisasiannya. Dalam perspektif ini, organisasi diletakkan sebagai sebuah proses dari suatu pengorganisasian dan pada aktivitas organisasi itu sendiri. Dalam konteks ini, entitas sosial mengandung makna sudah terorganisir (Buelens dalam Henne & Desmidt 2010;1)

Ada empat prinsip utama organisasi yang dijelaskan Daft dalam Henne & Desmidt (2010;2)

1. Organisasi merupakan entitas-entitas sosial yang terdiri atas manusia

- dan kelompok manusia.
2. Organisasi akan senantiasa terarah pada tujuan tertentu, dikarenakan keberadaan tujuan itulah merupakan perwujudan dari alasan berdirinya suatu organisasi.
  3. Organisasi mengandung sistem-sistem yang dikoordinasikan secara rasional agar mampu meraih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
  4. Organisasi memiliki rambu-rambu pembatas yang relatif teridentifikasi secara jelas, yang menentukan unsur mana saja yang termasuk bagian atau bukan dari organisasi itu.

#### 2.1.4 Deskripsi Konseptual Evaluasi

Evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan dapat dicapai. Malcolm, Provus, pencetus *Discrepancy Evaluation* mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih (Tayibnapis, 2008;3) Komite untuk standar evaluasi memutuskan bahwa evaluasi ialah penelitian yang sistematis atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek (*Join Comittee* dalam Tayibnapis, 2008;4).

Scriven orang pertama yang membedakan antara evaluasi formatif yaitu evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan, kemudian evaluasi sumatif yaitu evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi, atau lanjutan. sebagai fungsi evaluasi

yang utama. Kemudian Stufflebeam juga membedakan sesuai dengan Scriven yaitu *Proactive evaluation* untuk melayani pemegang keputusan, dan *Retroactive evaluation* untuk keperluan pertanggungjawaban. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat (Tayibnapi, 2008;4).

Menurut Indiahono (2009;145) Evaluasi kebijakan adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk kepada dua aspek yaitu Proses dan hasil. Kemudian menurut Nurcholis (2005;274) Evaluasi Kebijakan Publik adalah penilaian secara menyeluruh *input, proses, output*, dan *outcome* dari kebijakan Pemerintah Daerah.

Boyle (dalam Suharto, 2005:120) menyatakan bahwa evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar sosial.

Hampir semua bentuk permasalahan dapat dijadikan objek evaluasi untuk menolong menentukan apa informasi yang dikumpulkan dan bagaimana menganalisisnya. Hal ini akan membantu pemfokusan evaluasi. Setelah

menentukan objek yang akan di evaluasi, maka harus ditentukan aspek-aspek dari objek yang akan dievaluasi.

Jenis-jenis pelaksanaan evaluasi (Suryahadi, 2007;81)

- a) Evaluasi formatif
  - 1) Dilaksanakan pada waktu berjalannya program
  - 2) Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program
  - 3) Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
- b) Evaluasi sumatif
  - 1) Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
  - 2) Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
  - 3) Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program

Menurut Ndraha (2003;201) evaluasi adalah proses perbandingan antara fakta dan analisisnya. Kemudian terdapat model evaluasi tersebut, antara lain : a) Model *Before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku *treatment*) tolak ukurnya adalah *before*; b) Model *das-solen das-sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya; dan, c) Model kelompok kontrol.

Dalam pelaksanaan evaluasi, terdapat beberapa tahap pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang efektif, hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan ini dilaksanakan dengan benar (Suryahadi, 2007;83-84). Tahapan proses evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Menentukan tujuan evaluasi

Sebuah evaluasi perlu memiliki tujuan yang jelas. Tujuan evaluasi yang jelas akan membantu dalam penyusunan desain evaluasi yang sesuai. Dalam menentukan tujuan evaluasi, perlu mempertimbangkan berbagai konteks yang relevan, baik berkaitan dengan tujuan program itu sendiri maupun tujuan kebijakan yang lebih luas.

2. Menyusun desain evaluasi yang kredibel

Tahap ini terdiri dari beberapa langkah: (a) menentukan indikator dan tolak ukur yang akan digunakan dalam evaluasi untuk mengukur keberhasilan program; (b) menentukan metode analisis yang akan digunakan dalam evaluasi dan kebutuhan data, termasuk cara pengumpulannya; (c) menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi; dan (d) menghitung perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan evaluasi.

3. Mendiskusikan rencana evaluasi

Pihak-pihak yang pertama kali perlu diajak berdiskusi mengenai rencana evaluasi adalah penyandang dana program dan pelaksana program. Mereka perlu dilibatkan sejak awal agar dapat membantu pelaksanaan evaluasi dan tidak justru sebaliknya menghambat kegiatan ini. Di samping itu perlu juga mendiskusikan rencana evaluasi, terutama rencana desain evaluasi, dengan ahli evaluasi yang berkompeten untuk memperoleh masukan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dari rencana desain evaluasi yang telah disusun.

4. Menentukan pelaku evaluasi

Setelah rencana evaluasi mendapat persetujuan dari berbagai pihak yang berkepentingan, langkah selanjutnya adalah memilih orang atau lembaga yang akan ditugaskan untuk melakukan evaluasi. Pelaku evaluasi dari bersifat internal, yaitu berasal dari pelaksana program sendiri, ataupun eksternal, yaitu pihak luar atau independen.

5. Melaksanakan evaluasi

Kegiatan inti dalam evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta penulisan laporan evaluasi. Oleh karena itu, pengawasan kualitas data dan analisis sangat krusial untuk memperoleh kualitas evaluasi yang baik. Dalam penulisan laporan, penting untuk memperhatikan kaidah-kaidah penulisan ilmiah agar dihasilkan suatu laporan evaluasi yang baik, baik dilihat dari segi substansi maupun tata bahasa.

6. Mendiseminasikan hasil evaluasi

Laporan evaluasi umumnya bersifat teknis, sehingga mungkin sulit dimengerti oleh orang awam. Agar hasil evaluasi dapat digunakan seoptimal mungkin, perlu dibuat versi ringkas dari laporan yang berfokus pada temuan utama dan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh umum.

7. Menggunakan hasil evaluasi

Hasil evaluasi dapat memberikan rekomendasi berupa tuntutan perubahan, baik dalam pelaksanaan atau bahkan dalam desain program. Perubahan yang disarankan adalah untuk membuat program menjadi lebih efektif dalam upaya mencapai tujuan-tujuannya. Lebih

dari itu, hasil evaluasi juga memberikan pembelajaran bagi organisasi pelaksana program secara keseluruhan agar pelaksanaan program-program di masa depan dapat menjadi lebih baik. Pembelajaran dari hasil evaluasi juga akan sangat berguna bagi penyusunan program atau kebijakan baru.

Tujuan evaluasi menurut Suryahadi (2007;87) terbagi dari 3 (Tiga) *stage*;

- a. Evaluasi proses : bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (*service delivery*).
- b. Evaluasi biaya-manfaat : mengkaji biaya program relatif terhadap penggunaan sumberdaya dan manfaat program.
- c. Evaluasi dampak : apakah program dapat memberikan pengaruh yang diinginkan.

Ada 4 model evaluasi yang di jelaskan Tayibnapi dalam bukunya “Evaluasi Program dan Instruman Evaluasi” (2008;14) sebagai berikut :

- a) Model Evaluasi CIPP

Stufflebeam (1969, 1971, 1983, Stufflebeam dan Shinkfield, 1985) adalah ahli yang mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk menolong admisitrator membuat keputusan. Ia merumuskan evaluasi sebagai suatu proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Membuat krrja untuk melayani para manajer dan administrator, membagi evaluasi menjadi 4 (empat) macam,

*Contect evaluation to serve planning decision.* Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan

yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program.

*Input evaluation, structuring decision.* Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

*Proces evaluation, to serve implementing decision.* Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sampai sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol, dan diperbaiki.

*Product evaluation, to serve recycling decision.* Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan? Huruf pertama dari konteks evaluasi dijadikan ringkasan CIPP, model ini terkenal dengan nama model CIPP oleh STufflebeam

b) Model Evaluasi UCLA

Alkin (1969) menulis tentang kerangka kerja evaluasi yang hampir sama dengan model CIPP. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan

dalam memilih beberapa alternatif. Ia mengemukakan 5 (lima) macam evaluasi, yakni :

- 1) *Sistem assessment*, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem.
- 2) *Program planning*, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.
- 3) *Program implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan?
- 4) *Program improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan? Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga?
- 5) *Program certification*, yang memberi informasi tentang nilai atau guna program.

c) Model Evaluasi Brinkerhoff

Setiap desain evaluasi umumnya terdiri atas elemen-elemen yang sama, ada banyak cara untuk menggabungkan elemen tersebut, masing-masing ahli atau evaluator mempunyai konsep yang berbeda dalam hal ini. Brinkerhoff & Cs. (1983) mengemukakan 3 (tiga) golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti evaluator-evaluator lain, namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri sebagai berikut :

### 1) *Fixed vs Emergent Evaluation Design*

Desain evaluasi yang tetap (*fixed*) ditentukan dan direncanakan secara sistematis sebelum implementasi dikerjakan. Desain dikembangkan berdasarkan tujuan program disertai seperangkat pertanyaan yang akan dijawab oleh informasi yang akan diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Rencana analisis dibuat sebelumnya dimana sipemakai akan menerima informasi seperti yang telah ditentukan dalam tujuan. Walaupun desain *fixed* ini lebih terstruktur daripada desain *emergent*, desain *fixed* juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang mungkin berubah. Kebanyakan evaluasi formal yang dibuat secara individu dibuat berdasarkan desain *fixed*, karena tujuan program telah ditentukan dengan jelas sebelumnya, dibiayai dan melalui usulan atau proposal evaluasi.

Kegiatan desain *fixed* berkisar antara membuat pertanyaan-pertanyaan, menyiapkan dan membuat instrumen, menganalisis hasil evaluasi, dan melaporkan secara formal hasil evaluasi kepada pemakai.

Komunikasi antara evaluator dan audiensi atau klien dilakukan secara teratur, biasanya formal atau tertulis. Evaluator berpedoman pada tujuan program untuk merumuskan masalah atau pertanyaan-pertanyaan desain dan menstimulasi audiensi

yang relevan untuk mengembangkan dan membetulkan pertanyaan tersebut.

Strategi pengumpulan informasi khususnya menggunakan cara-cara formal (misalnya tes, survei, kuesioner, dan *rating scale*), juga metode penelitian, kriteria penelitian seperti validitas internal dan eksternal juga reliabilitas dianggap penting. Pengumpulan data biasanya secara kuantitatif. Desain biasanya dibicarakan dan dirundingkan dengan pemakai yang utama atau pemesan. Bila ada perubahan biasanya hanya untuk lebih memperlancar pencapaian tujuan dan rencana utama.

*Desain evaluasi emergent.* Evaluasi ini dibuat untuk beradaptasi dengan pengaruh dan situasi yang sedang berlangsung dan berkembang seperti menampung pendapat-pendapat audiensi, masalah-masalah, kegiatan program. Evaluasi ini menghabiskan banyak waktu dari permulaan sampai akhir mencari tujuan dan isu, karena semua pada dasarnya tidak dikhususkan dan ditentukan sebelumnya. Biaya relatif lebih besar. Sumber-sumber dalam desain ditentukan untuk mengamati program dan memfokuskan pertanyaan lebih lanjut. Evaluator tidak mendorong audiensi untuk memikir tentang program atau isu evaluasi. Audiensi menentukan isu-isu penting dan informasi yang diperlukan desain. Komunikasi antara evaluator dan audiensi terus berkesinambungan selama proses evaluasi Observasi, studi kasus,

dan laporan tim penyokong merupakan contoh metode evaluasi ini. Pengukuran yang tidak selalu berpedoman pada tujuan biasanya dilakukan dan evaluator sering mengorbankan ketepatan pengukuran untuk lebih berguna. Informasi yang kualitatif biasanya dikumpulkan. Desain terus berkembang, berubah, dan bereaksi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dapat dikatakan tak pernah berhenti.

## 2) *Formative vs Summative Evaluation*

*Formative evaluation* digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki proyek, kurikulum, atau lokakarya. Dibuat untuk digunakan karyawan, dapat juga mengorbankan kepentingan orang luar untuk lebih bermanfaat bagi program. Ada yang mengatakan bahwa evaluasi yang paling melindungi program yaitu *formative evaluation*.

Fokus evaluasi berkisar pada kebutuhan yang dirumuskan oleh karyawan atau orang-orang program. Evaluator sering merupakan bagian daripada program dan bekerja sama dengan orang-orang program. Strategi pengumpulan informasi mungkin juga dipakai, tetapi penekanan pada usaha memberikan informasi yang berguna secepatnya bagi perbaikan program. Desain evaluasi (*fixed* atau *emergent*) dibuat bersama orang-orang proyek dan direvisi untuk mencapai kebutuhan mereka.

*Summative Evaluation* dibuat untuk menilai kegunaan suatu objek. Sering diminta atau dibiayai oleh pemakai, pemesan, atau oleh sponsor serta administrator untuk urusan pajak. *Summative evaluation* digunakan untuk menilai apakah suatu program akan diteruskan atau dihentikan saja. Evaluator harus dapat dipercaya oleh sejumlah audiensi yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Untuk usaha-usaha yang diayai perorangan, *summative evaluation* ini lebih populer dari *formative evaluation*. Apakah program akan dipakai tergantung pembuat keputusan yang menetapkan. Pada *summative evaluation* evaluasi berfokus pada variabel-variabel yang dianggap penting oleh sponsor atau pembuat keputusan. Evaluator luar atau tim *review* sering dipakai, karena evaluator internal dapat mempunyai minat yang berbeda. Strategi pengumpulan informasi akan memaksimalkan validitas eksternal yang mungkin dikumpulkan dalam waktu yang cukup lama. Desain evaluasi dapat berupa *emergent*, dapat juga berupa *fixed*, dibuat untuk mencapai kebutuhan sponsor dan pemegang kunci keputusan.

3) *Experimental and Quasi Experimental Design vs Natural/Unobtrusive inquiry*

Beberapa evaluasi memakai metodolgi penelitian klasik. Seperti, subjek penelitian di acak, perlakuan diberikan, dan pengukuran dampak dilakukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai

manfaat suatu objek, suatu program atau strategi baru yang dicobakan. Apabila proram dipilih secara acak, maka generalisasi dapat dibuat pada populasi yang agak luas. Namun sepertinya tidak etik untuk mengintervensi kedalam lingkungan pendidikan dengan memilih atau memberi perlakuan. Jadi, sampai sejauh mana lingkungan dapat dimanipulasi dan sampai sejauh mana suatu strategi dianggap pantas, merupakan pemikiran yang cukup serius dalam bidang ini.

Dalam beberapa hal, intervensi tidak mungkin dilakukan atau tidak dikehendaki. Apabila proses sudah terjadi, evaluator harus melihat dokumen-dokumen sejarah, mempelajari nilai tes, atau menganalisis penelitian yang dilakukan. Bila di anggap penting untuk mengevaluasi suatu lingkungan atau program agar dapat diperbaiki, evaluator mungkin memilih mengamatinya, bicara dengan orang-orang yang terlibat, dan selalu merendah (*low profile*), agar program yang mereka evaluasi tidak terancam dan mengubah diri karena kehadiran evaluator. Banyak metodologi, termasuk observasi, survei, analosis meta, studi kasus, dan wawancara dapat dilakukan seperti itu untuk mengurangi dampak evaluasi pada orang dan proyek, serta memaksimalkan laporan yang sebenarnya.

Desain metode klasik memakan banyak waktu dan biaya yang digunakan untuk mempersiapkan instrumen dalam menilai perlakuan, data kuantitatif biasanya dikumpulkan, dan kriteria statistik juga digunakan. Kriteria statistik berfokus pada hasil program yang dibuat sebelumnya. Interaksi dengan audiensi

dilakukan untuk membuat rencana, mengumpulkan informasi, dan melaporkan kembali. Strategi pengumpulan data terutama menggunakan instrumen formal seperti tes, survei, kuisioner, dan skala rating serta memakai metode penelitian yang standar. Kriteria penelitian seperti *internal* dan *external validity* dianggap penting. Data yang dikumpulkan kebanyakan kuantitatif. Desain penelitian biasanya dibuat bersama pemesan atau pemakai. Bila ada perubahan, hanya untuk memperlancar pencapaian tujuan sesuai rencana.

Desain penelitian *Natural Inquiry*. Evaluator menghabiskan banyak waktu untuk mengamati dan berbicara dengan audiensi yang relevan. Strategi yang *multiple* dan sumber-sumber dipakai untuk mempertinggi reliabilitas pengumpulan data. Evaluator merundingkan isu dengan audiensi, hal ini dilakukan sesuai dengan cara evaluator. Interaksi dengan audiensi berkesinambungan dan informal. Observasi, studi kasus, laporan tim penyokong, merupakan ciri-ciri desain penelitian ini. Demi untuk lebih berguna, evaluator sering mengorbankan pengukuran dan tujuannya.

d) Model Stake atau Model Countenance

Stake (1967), analisis proses evaluasi yang dikemukakannya membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini dan meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam evaluasi.

Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi ialah *Descriptions* dan *Judgement* yang membedakan adanya 3 (tiga) tahap dalam program, yaitu ; *Antecedents (Context)*, *Transaction (Process)*, dan *Outcomes*

(*Output*). *Matrix Description* menunjukkan *Intents (Goals)* dan *Observation (Effects)* atau yang sebenarnya terjadi. *Judgements* mempunyai 2 (dua) aspek, yaitu *Standard and Judgement*. Stake mengatakan bahwa apabila kita menilai suatu program, kita harus perbandingan yang relatif antara suatu program dengan yang lain, atau perbandingan yang absolut.

Penekanan yang umum dalam model ini ialah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake mengatakan bahwa *description* di satu pihak berbeda dengan *judgement* (penilaian). Dalam model ini, *antecedents* (masukan), *Transaction* (proses), dan *Outcomes* (hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut, untuk menilai manfaat program. Stake mengatakan bahwa tidak ada penelitian yang dapat diandalkan apabila tidak dinilai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan/program. Terdapat banyak model evaluasi yang dibuat oleh ahli-ahli atau pakar-pakar evaluasi, tetapi dalam pembahasan ini hanya akan membahas model yang populer dan banyak dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi.

Penelitian ini menggunakan tipe evaluasi kebijakan ketiga sebagaimana dikemukakan oleh James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) bahwa tipe evaluasi kebijakan sistematis yaitu tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi

masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Sesuai dengan berbagai penjelasan diatas tipe evaluasi kebijakan sistematis digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur pelaksanaan Kebijakan Program DMIJ sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.1.5 Konsep Pembangunan**

Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan. (Sadono Sukirno: 2006; 53)

Menurut Sondang P. Siagan pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam pembinaan bangsa.

Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamdjojo, pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Beberapa pengertian pokok mengenai pembangunan, yaitu :

- a. Pembangunan merupakan proses atau perubahan yang berkesinambungan atau dengan istilah dengan tahapan.
- b. Dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pembangunan maka awalnya dimulai pengembangan sektor ekonomi tanpa melalui sektor lain.
- c. Diperlunya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanya.

- d. Untuk pelaksanaan sebaiknya instansi-instansi kemasyarakatan seperti gotong royong, permufakatan, permusyawaratan dan lain-lain perlu diperiksa dengan seksama, akhirnya nilai-nilai positif dari hal-hal tersebut dapat dikembangkan untuk pembangunan

Pengertian pembangunan dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu usaha perubahan yang berencana yang tanpa akhir dengan melalui tahapan-tahapan dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan juga dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh masyarakat dalam suatu Negara. Hingga saat ini pemahaman tentang definisi pembangunan ekonomi belum ada satupun definisi pembangunan ekonomi yang sama sekali tepat dan memuaskan, meskipun definisi yang sudah ada masih dapat difahami dan diterima secara umum. Akan tetapi bukan berarti teori – teori yang telah di kemukakan oleh para ahli ekonomi itu tidak bermanfaat, melainkan teori – teori tersebut masih berguna dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan suatu Negara pada masa – masa yang akan datang.

Pembangunan adalah suatu aktivitas yang sengaja direncanakan dan dilaksanakan, berarti pembangunan merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh setiap negara, baik itu negara yang telah maju maupun negara – negara yang masih atau sedang berkembang. Bagi negara – negara yang tergolong sudah maju, pembangunan ekonomi dilakukan dan digunakan untuk tujuan – tujuan yang bersifat ekonomis, politis, dan kebudayaan. Bersifat ekonomi artinya adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik. Bersifat politis berarti bagaimana menyebarkan faham

yang mereka anut kepada Negara lain, sehingga menjadi rekan yang baik dalam mencegah masuknya pengaruh dari Negara lain. Sedangkan bersifat kebudayaan adalah berusaha menyebarkan kebudayaan mereka terhadap Negara lain. Pemahaman pembangunan ekonomi bagi negara yang tergolong miskin, pembangunan ekonomi itu adalah bagaimana memacu pendapatan nasional untuk meningkatkan taraf hidup mereka agar dapat hidup layak dan bebas dari ketergantungan Negara lain. (Firdaus, 1987: 2). Pembangunan ekonomi meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan keseluruhan usaha – usaha pembangunan juga meliputi usaha pembangunan sosial, politik, dan budaya. H.F. Williamson menyatakan bahwa pembangunan ekonomi sebagai suatu proses, dimana suatu Negara dapat menggunakan sumber daya produksi sedemikian rupa, sehingga dapat memperbesar produk per kapita negara tersebut.

Pembangunan ekonomi juga dapat di defenisikan sebagai suatu usaha untuk memperbesar pendapatan per kapita dan meningkatnya keahlian. Karena suatu kemajuan tidak hanya diukur dengan pendapatan per kapita melainkan juga produktivitasnya.

Pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Jelas dapat dilihat dan didefenisikan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan :

1. Suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi secara terus menerus.

2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang

Dalam analisa, pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses agar saling berkaitan dan hubungan saling mempengaruhi antar faktor – faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi dapat dilihat. Cara analisis ini dapat diketahui deret peristiwa yang timbul sehingga akan mewujudkan peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ketahap berikutnya.

Selanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan ini merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam praktek, lajunya pembangunan ekonomi suatu Negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). (Sadono Sukirno, 1998: 13).

Perencanaan pembangunan adalah suatu program untuk strategi pemerintah Nasional maupun daerah, dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi kekuatan pasar supaya terjadi perkembangan dalam proses sosial. Bintoro Tjokroamdjojo (1990:12) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai pengarang penggunaan sumber-sumber pembangunan ( termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang baik secara lebih efisien dan efektif, sedangkan menurut Albert Waterston dalam Bintoro menyebutkan bahwa

perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dan mengambil pilihan sebagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan pembangunan tidak menyimpang dari tujuan. Perencanaan pembangunan dapat di artikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas skala kebutuhan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi semua komunitas masyarakat, pemerintah, lingkungan dan wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas. Adapun ciri-ciri perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tepat.
- b. Usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ciri ini merupakan kelanjutan dari ciri pertama, laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan perkapita.
- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
- d. Perluasan kesempatan kerja.

- e. Perluasan pemerataan pembangunan.
- f. Adanya usaha pembinaan dan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.

Didalam proses perencanaan pembangunan, maka diperlukan adanya penyusunan anggaran pembangunan yaitu :

1. Anggaran pembangunan harus berorientasi pada program, sehingga dapat mencerminkan kearah dari pembangunan daerah yang terdiri dari program dan proyek yang bersifat menunjang program dan proyek Nasional atau Propinsi. Oleh karena itu program/proyek yang akan dibiayai APBD Kabupaten/Kota harus paralel dengan program Nasional dan program provinsi secara terpadu. Dengan demikian, maka kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten/Kota masing-masing itu dapat dipenuhi, sekaligus menunjang dan melengkapi program Repelita Pusat dan Propinsi.
2. Dalam menyusun anggaran pembangunan daerah, harus memperhatikan keseimbangan, tidak saja antara proyek dengan proyek tahunan anggaran selanjutnya, tetapi juga repelita itu sendiri harus ada sinkronisasi.
3. Penyusunan anggaran pembangunan harus titik berat pada orientasi program berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh dinas/lembaga daerah yang telah disetujui untuk dituangkan kedalam anggaran daerah.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran menurut Mamesah (1995 : 82) antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip Anggaran berimbang Dinamis

Anggaran yang disediakan harus disesuaikan dengan kemampuan realitas serta adanya keseimbangan secara total antara penerimaan daerah dan belanja yang direncanakan serta jumlah penerimaan ini diusahakan semakin meningkat.

b. Prinsip Kemandirian

Usaha untuk meningkatkan PAD serta adanya upaya ketepatan penggunaan dana yang tersedia agar mengurangi ketergantungan kepada instansi yang lebih tinggi.

c. Prinsip Prioritas

Pengendalian Prioritas dalam penggunaan dana yang tersedia, serta memilih kegiatan dan program antara sektor yang terpenting.

d. Prinsip Efisien dan Efektifitas anggaran

Pengendalian pembiayaan dan penghematan dana yang menyeluruh pada prioritas daerah

e. Prinsip Disiplin Anggaran

Setiap dinas/lembaga/satuan kerja daerah yang memperoleh anggaran harus dapat menggunakan secara efisien, tepat guna, dan tepat waktu serta tidak melaksanakan kegiatan yang pembebanan dananya belum tersedia.

Untuk kelancaran dan kemandirian proses tersebut maka sesuai fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing aparat pemerintah daerah, maka perlu ditetapkan suatu jaringan kerja sebagai pedoman bagi segenap aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan APBD.

## 2.1.6 Deskripsi Konseptual Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ)

### a) Tujuan Program

Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang selanjutnya disebut DMIJ merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih. Tujuan umum Program DMIJ adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan khusus Program DMIJ meliputi :

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.
- 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya.
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan
- 4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar yang diprioritaskan oleh masyarakat

- 5) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
- 6) Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perbaikan lingkungan hidup

**b) Keluaran Program**

1. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa.
2. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan.
3. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan pembangunan Program DMIJ bagi masyarakat.
4. Membangkitkan kembali rasa kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat.
5. Menumbuhkembangkan rasa solidaritas semangat swadaya dan kreativitas masyarakat dipedesaan.
6. Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan.
7. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.

8. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan elompok perempuan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelestarian.

**c) Prinsip Dasar**

Prinsip-prinsip dasar program meliputi :

- a. Desentralisasi : Memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- b. Keterpaduan : Keselarasan dan kesatuan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan.
- c. Efektif dan Efisien : Proses (langkah dan cara kerja) yang tepat guna dan tepat sasaran serta membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin
- d. Partisipasi : Masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.
- e. Transparansi dan Akuntabel : Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan

dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (Menurut peraturan dan hukum yang berlaku).

- f. Kesetaraan dan keadilan gender : Masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
- g. Prioritas : Masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan, kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan, upaya perbaikan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
- h. Keberlanjutan : Mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan, dan mengembangkan kelangsungan sistem.

**d) Kerangka Kerja**

1. **Otonomi** Hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Pemberdayaan Masyarakat** Pelaksanaan kegiatan menjadi sarana bagi proses/upaya secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi secara partisipatif, demokratis, musyawarah, dan mufakat.

3. Swakelola → Prinsip pengelolaan kegiatan pada Program DMIJ dilaksanakan secara swakelola. Proses dan mekanisme dilakukan sesuai dengan PTO dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) **Sasaran**

I. Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran Program DMIJ meliputi seluruh desa di Kabupaten Indragiri Hilir

II. Kelompok Sasaran

- a. Masyarakat Desa
- b. Kelembagaan Masyarakat
- c. Pemerintahan Desa

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Evaluasi program dapat dikatakan melaksanakan penelitian untuk melihat tingkat keberhasilan program, Pelaksanaan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya tidak lepas dari konteks, input, dan proses yang berpengaruh pada keberhasilan penerapan program. Maka diperlukan penelitian pada setiap item yang penulis tetapkan yang diambil dari aturan dan petunjuk pelaksanaan program.

Pada Penelitian ini Peneliti menggunakan teori Guttman Terlaksana/tercapai atau Tidak terlaksana/tidak tercapai, yaitu apakah tujuan dan proses pencapaian tujuan program yang ditetapkan tercapai dan terlaksana. Maka dapat diambil kesimpulan untuk dijadikan kerangka pikiran ada beberapa faktor

yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut:

**Gambar. 2.1**  
**Kerangka Pikiran Evaluasi pelaksanaan Program DMIJ Kabupaten Indragiri Hilir di Desa Keritang Kecamatan Kemuning**



Sumber : *Modifikasi Penelitian, 2017*

### 2.3 Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian keadaan, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya.

1. Evaluasi adalah proses perbandingan antara fakta dan analisisnya.

2. Evaluasi kebijakan adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk kepada dua aspek yaitu Proses dan hasil.
3. Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu.
4. Program Desa Maju Indragiri Hlir Jaya yang selanjutnya disebut DMIJ merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih. Tujuan umum Program DMIJ adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan dengan ketentuan evaluasi pada program sesuai ketentuan yang berlaku pada Petunjuk Teknis Operasional (TPO), bahwa evaluasi dalam program bisa dilakukan pada saat berakhirnya satu fase program untuk melihat dampak program. Sehingga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, variabel penelitian yang dipakai antara lain :

- a. Standar Pelaksanaan Program
- b. Kesuksesan Program
- c. Pencapaian Kinerja
- d. Manfaat Program
- e. Penilaian Kemajuan Program
- f. Pelaporan

## 2.4 Operasional Variabel

**Tabel 2.1 : Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Program DMIJ di Desa Keritang Kabupaten Indragiri Hilir**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Pengukuran
<p>Evaluasi adalah melakukan perbandingan hasil antara fakta dengan ketentuan standar. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan yang telah dilakukan beserta kualitasnya, termasuk kinerja para pelaku. (G.R. Terry dalam Sufian, 2005).</p>	<p>Evaluasi Pelaksanaan Program DMIJ</p>	1. Standar Pelaksanaan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan dan Kelengkapan Dokumen Perencanaan Program</li> <li>b. Ketersediaan Anggaran</li> <li>c. Kejelasan Prosedur Pencapaian Tujuan Program</li> </ul>	<p>Menggunakan skala Guttman :  (Terlaksana/tercapai, Tidak terlaksana/ Tidak tercapai)</p>
		2. Kesuksesan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat</li> <li>b. Perkembangan Kelembagaan</li> <li>c. Pemberdayaan masyarakat</li> <li>d. Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun</li> </ul>	
		3. Pencapaian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Partisipasi Masyarakat</li> <li>b. Partisipasi Kelompok Perempuan</li> <li>c. Pendayagunaan SDM dan SDA Lokal sebagai Lembaga Pengelola Partisipatif</li> <li>d. Penyediaan Sarana dan Prasarana sosial dasar yang diprioritaskan masyarakat</li> <li>e. Pembentukan dan Perkembangan Badan Kerjasama Desa (BKD)</li> </ul>	
		4. Manfaat Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa.</li> <li>b. Nilai gotong royong masyarakat</li> </ul>	
		5. Penilaian Kemajuan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cara Penilaian</li> </ul>	
		6. Pelaporan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Lisan</li> <li>b. Laporan Tertulis Berkala</li> </ul>	

Sumber: modifikasi Peneliti 2017